

ABSTRAK

Abstrak

Karya tulis ini bertujuan untuk menganalisis penerapan, kendala, dan alternatif solusi terkait operasional Kawasan Berikat Mandiri di bawah pengawasan KPPBC TMP B Yogyakarta. Karya tulis ini disajikan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan terhadap PT Udaka Indonesia dan PT Marvel Sport Internasional selaku Kawasan Berikat Mandiri di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan Kawasan Berikat Mandiri sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur terkait hal tersebut. Kendala yang terjadi yaitu belum adanya peraturan dari pemerintah terkait tata laksana pelayanan mandiri secara rinci, masih terdapat rasa takut Pengusaha Kawasan Berikat untuk menjadi Kawasan Berikat Mandiri, dan sumber daya manusia yang tidak konsisten dalam melaksanakan tugas pada Kawasan Berikat Mandiri. Hal tersebut disikapi dengan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh perusahaan, dilakukannya sosialisasi, dan pembangunan satu visi dan misi. Alternatif solusi yang ditawarkan berupa merencanakan dan mengesahkan peraturan mengenai tata laksana pelayanan mandiri oleh Pemerintah, melakukan sosialisasi melalui pembuatan konten terkait Kawasan Berikat Mandiri oleh pihak KPPBC TMP B Yogyakarta, serta melakukan rapat secara berkala dan memberikan intruksi kerja oleh perusahaan atau pihak Kawasan Berikat Mandiri.

Kata kunci: Operasional, Kawasan Berikat Mandiri, Yogyakarta

Abstract

This paper aims to analyze the implementation, constraints, and alternative solutions related to the operation of the Self-Managed Bonded Zone under the supervision of KPPBC TMP B Yogyakarta. This paper is presented using a qualitative approach with data collection methods through library research and field studies of PT Udaka Indonesia and PT Marvel Sport Internasional as Self-Managed Bonded Zones in the Special Region of Yogyakarta. The results of the analysis show that the application of the Self-Managed Bonded Zone is under regulations governing this matter. However, there are several constraints: the absence of rules from the government related to the management of self-service in detail, there is still a fear of Bonded Zone Entrepreneurs becoming a Self-Managed Bonded Zone, and inconsistent human resources in carrying out tasks in Self-Managed Bonded Zones. The constraints were addressed by making the company's Standard Operating Procedures (SOP), socialization, and developing a vision and mission. The alternative solutions offered are planning and ratifying regulations regarding self-service management by the government, conducting socialization through creating content related to Self-Managed Bonded Zones by KPPBC TMP

B Yogyakarta, and holding regular meetings and providing work instructions by the company or the Self-Managed Bonded Zone.

Keywords: Operation, Self-Managed Bonded Zone, Yogyakarta